

Laporan Keuangan Semester I 2024

Pengadilan Negeri Curup

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Curup adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Curup. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Curup, 30 Juni 2024

Sekretaris Pengadilan Negeri Curup

Sri Siskayanti, S.Sos. M.Si
198407062009042007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister	

C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	34
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	42
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Curup yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 30 Juni 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Curup, 30 Juni 2024
Sekretaris Pengadilan Negeri Curup

Sri Siskawanti, S.Sos. M.Si
198407062009042007

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Curup Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp11.134.413 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp11.134.413 atau mencapai 49,04 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp22.703.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp2.418.596.990 atau mencapai 53,46 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp4.524.254.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 30 Juni 2024. Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp10.181.762.022 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp39.959.614; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp10.141.802.408 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp241.786.061 dan Rp9.939.975.961

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp13.009.614 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.876.244.792 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-2.863.235.178, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-2.863.235.178.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp10.395.736.656, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-2.863.235.178 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 2.407.474.483 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp9.939.975.961

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

U R A I A N	Catatan	TA 2024		% thd Angg	TA 2023 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	22.703.000	11.134.413	49,04	12.214.970
JUMLAH PENDAPATAN		22.703.000	11.134.413	49,04	12.214.970
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	3.254.463.000	1.714.437.738	52,68	1.887.773.783
Belanja Barang	B.2.2	1.269.791.000	704.159.252	55,45	577.170.197
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	107.500.000
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		4.524.254.000	2.418.596.990	53,46	2.572.443.980

Curup, 30 Juni 2024
 Sekretaris Pengadilan Negeri Curup

 Sri Siskawanti, S.Sos. M.Si
 198407062009042007

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

U R A I A N	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	30.000.000	30.000.000
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	1.608.014	1.763.686
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.14	-	-
Persediaan	C.15	8.351.600	3.832.500
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	640.000
Jumlah Aset Lancar		39.959.614	36.236.186
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
Jumlah Properti Investasi		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.23	4.773.260.000	4.773.260.000
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	3.268.152.153	3.263.547.153
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	7.804.290.293	7.804.290.293
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	6.730.950	6.730.950
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	(5.710.630.988)	(4.978.487.789)
Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
Jumlah Aset Tetap		10.141.802.408	10.869.340.607
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		10.181.762.022	10.905.576.793
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	207.433.061	224.144.933
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	4.353.000	9.530.000
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	-	-

Uang Muka dari KPPN	C.50	30.000.000	30.000.000
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		241.786.061	263.674.933
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		241.786.061	263.674.933
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	9.939.975.961	10.641.901.860
JUMLAH EKUITAS		9.939.975.961	10.641.901.860
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		10.181.762.022	10.905.576.793

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	13.009.614	14.863.656
Jumlah Pendapatan		13.009.614	14.863.656
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	1.877.419.705	2.091.541.538
Beban Persediaan	D.4	22.644.200	16.085.686
Beban Barang dan Jasa	D.5	280.187.166	313.403.683
Beban Pemeliharaan	D.6	369.522.379	223.824.216
Beban Perjalanan Dinas	D.7	44.654.395	40.236.574
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	281.816.947	331.255.044
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Rincian Khusus Beban dalam rangka penanganan covid-19	D.12	-	-
Jumlah Beban		2.876.244.792	3.016.346.741
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(2.863.235.178)	(3.001.483.085)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		-	-
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(2.863.235.178)	(3.001.483.085)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(2.863.235.178)	(3.001.483.085)

Curup, 30 Juni 2024
 Sekretaris Pengadilan Negeri Curup

Sri Siska Yanti, S.Sos M.Si
 198407062009042007

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	10.395.736.656	11.062.295.488
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(2.863.235.178)	(3.001.483.085)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	(13.890.875)
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	(13.890.875)
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	(13.890.875)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	2.407.474.483	2.594.980.332
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(455.760.695)	(420.393.628)
EKUITAS AKHIR	E.6	9.939.975.961	10.641.901.860



Curup, 30 Juni 2024
 Sekretaris Pengadilan Negeri Curup

Sri Siska Yanti, S.Sos. M.Si
 198407062009042007

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 30 Juni 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Curup. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Curup. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.

- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek**
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang**
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2024	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	22.703.000	22.703.000
Jumlah Pendapatan	22.703.000	22.703.000
Belanja		
Belanja Pegawai	3.754.463.000	3.254.463.000
Belanja Barang	1.269.791.000	1.269.791.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	5.024.254.000	4.524.254.000

Realisasi Pendapatan
Rp11.134.413

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp11.134.413 atau mencapai 49,04 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp22.703.000. Pendapatan Pengadilan Negeri Curup terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp11.134.413. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	22.703.000	11.134.413	49,04
Jumlah	22.703.000	11.134.413	49,04

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 8,85 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	11.134.413	12.214.970	(8,85)
Jumlah	11.134.413	12.214.970	(8,85)

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2024 sebesar 0,00 dari TA 2023 . Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp11.134.413

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.134.413 dan Rp12.214.970. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami penurunan sebesar 8,85 dari TA 2023. Penurunan realisasi untuk Tahun Anggaran 2024 disebabkan karena berkurangnya jumlah penghuni rumah dinas pada Satker Pengadilan negeri

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	11.134.413	12.214.970	(8,85)
Jumlah	11.134.413	12.214.970	(8,85)

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	11.134.413	12.214.970	(8,85)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	11.134.413	12.214.970	(8,85)

B.2 Belanja

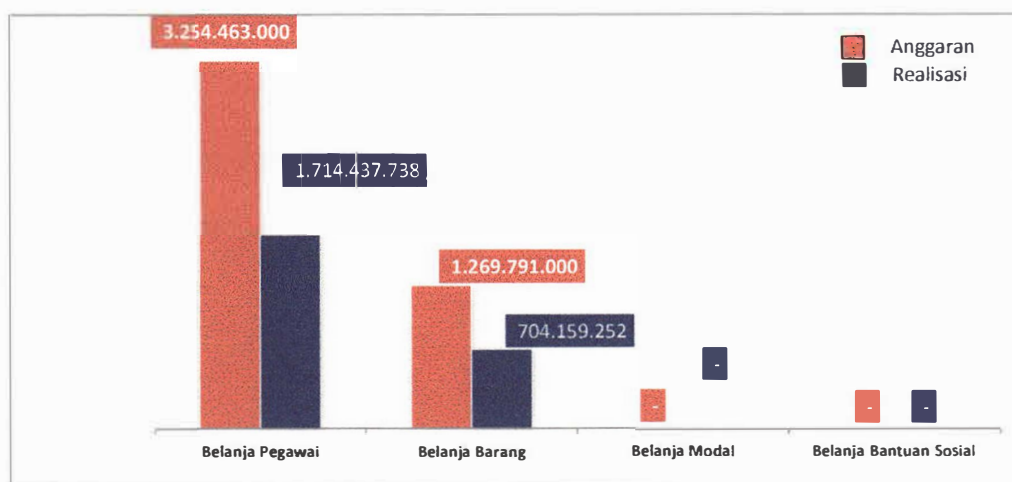
Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp2.418.596.990 atau 53,46 % dari anggaran belanja sebesar Rp4.524.254.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2024

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	3.254.463.000	1.714.437.738	52,68
Belanja Barang	1.269.791.000	704.159.252	55,45
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	4.524.254.000	2.418.596.990	53,46

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2024



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 5,98%. Berikut rincian realisasi belanja TA 2024 dan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Pegawai	1.714.437.738	1.887.773.783	(9,18)
Belanja Barang	704.159.252	577.170.197	22,00
Belanja Modal	-	107.500.000	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	2.418.596.990	2.572.443.980	(5,98)

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.714.437.738 dan Rp1.887.773.783. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami penurunan sebesar 9,18 % dari TA 2023. Hal ini disebabkan karena jumlah pegawai pada satker Pengadilan Negeri Curup berkurang dikarenakan terdapat pengurangan sebanyak 6 orang yang terdiri dari 3 orang PNS dan 3 orang Hakim

Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	813.919.660	816.469.700	(0,31)
Belanja Honor Output Kegiatan	-	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	48.903.240	54.150.134	(9,69)
Belanja Tunj. Anak PNS	16.000.388	18.598.786	(13,97)
Belanja Tunj. Struktural PNS	20.800.000	20.800.000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	558.780.000	725.260.000	(22,95)
Belanja Tunj. PPh PNS	86.817.540	87.240.336	(0,48)
Belanja Tunj. Beras PNS	40.627.620	47.073.000	(13,69)
Belanja Uang Makan PNS	114.610.000	103.832.000	10,38
Belanja Tunjangan Umum PNS	13.980.000	14.350.000	(2,58)
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	1.714.438.448	1.887.773.956	(9,18)
Pengembalian Belanja Pegawai	710	173	310,40
Jumlah Belanja	1.714.437.738	1.887.773.783	(9,18)

Realisasi Belanja
Barang Rp704 159 252

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp704.159.252 dan Rp577.170.197. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 22,00% dari Realisasi TA 2023.

Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan belanja barang pada Tahun Anggaran 2024 ini dikarenakan terdapat banyak perbaikan terhadap gedung dan bangunan sehingga Belanja

Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional	274.356.765	283.715.106	(3,30)
Belanja Barang Non Operasional	-	17.180.000	(100,00)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	19.887.300	15.124.500	31,49
Belanja Jasa	2.613.713	2.376.601	9,98
Belanja Pemeliharaan	363.027.079	219.247.416	65,58
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	44.274.395	39.526.574	12,01
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	704.159.252	577.170.197	22,00
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	704.159.252	577.170.197	22,00

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2024

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Rp0

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp107.500.000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh penurunan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dikarenakan pada Tahun Anggaran

Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	3.000.000	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	104.500.000	(100,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	107.500.000	(100,00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	107.500.000	(100,00)

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh

Perbandingan Belanja Modal Tanah Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, mengalami penurunan sebesar 100,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan oleh penurunan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dikarenakan pada Tahun Anggaran 2024 ini tidak terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	3.000.000	(100,00)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	3.000.000	(100,00)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	3.000.000	(100,00)

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp104.500.000 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan Realisasi TA 2023. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari penurunan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dikarenakan pada Tahun

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	104.500.000	(100,00)
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	104.500.000	(100,00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	104.500.000	(100,00)

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2023. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp30.000.000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.30.000.000 dan Rp.30.000.000. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester I TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Semester I TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Semester I TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid) Rp0

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Semester I TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Uang Muka Belanja
(prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Semester I TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

Pendapatan yang Masih
Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Semester I TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Semester I TA 2024 dan 2023

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Perpajakan Rp0

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Semester I TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	1.000.000	0,5%	5.000
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	1.000.000		5.000

Piutang Bukan Pajak
Rp1.608.014

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.608.014 dan Rp1.763.686. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Semester I TA 2024 dan 2023

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Piutang Lainnya	1.608.014	1.763.686
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	1.608.014	1.763.686

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak Rp0

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Semester I TA 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester I TA 2024 dan 2023

Jenis	TAHUN 2024	TAHUN 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester I TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Persediaan
Rp8.351.600

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp8.351.600 dan Rp3.832.500. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester I TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Barang Konsumsi	7.905.900	3.677.500
Bahan untuk Pemeliharaan	445.700	155.000
Jumlah	8.351.600	3.832.500

Persediaan tersebut di atas dalam

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Jumlah		-	-

Persediaan yang Belum
Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp640.000.

Piutang Tagihan
Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester I TA 2024 dan 2023

Debitur	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 30 Juni 2024 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2024 dan 2023

Debitur	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka Panjang
lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 30 Juni 2024 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Semester I TA 2024 dan 2023

U R A I A N	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih-Piutang Jgk
Panjang Rp0

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 Juni 2024 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Semester I TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Properti Investasi Rp0

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 30 Juni 2024 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Semester I TA 2024 dan 2023

U R A I A N	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

*Akumulasi Penyusutan
Properti Investasi Rp0*

C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

*Tanah
Rp4.773.260.000*

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp4.773.260.000 dan Rp4.773.260.000. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	4.773.260.000
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi kurang :	-
Transfer Keluar	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Saldo per 30 Juni 2024	4.773.260.000

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Semester I TA 2024

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
Jumlah			-

Penjelasan tentang kondisi Tanah

*Tanah Belum Diregister
Rp0*

C.24 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Peralatan dan Mesin
Rp3.268.152.153*

C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp3.268.152.153 dan Rp3.263.547.153. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	3.263.547.153
Mutasi tambah:	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Saldo per 30 Juni 2024	3.263.547.153
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(2.904.778.159)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	358.768.994

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

-
-
-
-

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

-
-
-
-
-
-
-
-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0

C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan
Rp7.804.290.293

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.804.290.293 dan Rp7.804.290.293. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	7.804.290.293
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 30 Juni 2024	7.804.290.293
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(2.805.852.829)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	4.998.437.464

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

-	-
-	-
-	-

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

-	-
-	-
-	-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
Saldo per	-
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	-

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

-	-
-	-

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

-	-
-	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp6.730.950

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp6.730.950 dan Rp6.730.950. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	6.730.950
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 30 Juni 2024	6.730.950
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	6.730.950

Mutasi tambah/kurang:

0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 30 Juni 2024	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp5.710.630.988

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp5.710.630.988 dan Rp4.978.487.789. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester I Tahun 2024

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.268.152.153	(2.904.778.159)	363.373.994
2	Gedung dan Bangunan	7.804.290.293	(2.805.852.829)	4.998.437.464
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	6.730.950	-	6.730.950
Akumulasi Penyusutan		11.079.173.396	(5.710.630.988)	5.368.542.408

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Konsesi Jasa Rp0

C.35 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Semester I TA 2024 dan 2023

U R A I A N	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Kemitraan Dengan
Pihak Ketiga Rp0

C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Semester I Tahun 2024

No	U r a i a n	Jumlah
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Aset Tak Berwujud Rp0

C.38 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Curup berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
Saldo Nilai per 30 Juni 2024	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

a.	-
b.	-
c.	-
d.	-
e.	-

Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan Rp0

C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya Rp0

C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023
Dana Lainnya	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 30 Juni 2024	-
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	-

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang

-	-
-	-
-	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan

berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
-	-	-	-
Total	-	-	-

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp207.433.061

C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp207.433.061 dan Rp224.144.933. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp4.353.000

C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.353.000 dan Rp9.530.000. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Hibah Yang Belum
Disahkan Rp0

C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :
hibah yang belum disahkan berasal dari bank

C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

berasal dari gedung yang disewakan dengan pembayaran di awal kontrak

C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp30.000.000 dan Rp30.000.000. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	30.000.000
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	30.000.000

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Kewajiban Konsesi Jasa
Rp0

C.52 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

*Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :
tentang konsesii jasa*

Ekuitas
Rp9.939.975.961

C.53 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.939.975.961. dan Rp10.641.901.860. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 54 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp13.009.614

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp13.009.614 dan Rp14.863.656. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 12,47. Hal tersebut disebabkan oleh Pendapatan Pengadilan Negeri Curup terdiri dari Penerimaan Pajak Rp 0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 13.009.614. Pendapatan Negara Bukan Pajak bersumber dari Pendapatan Sewa Rumah

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	13.009.614	14.863.656,00	(12,47)
Pendapatan Ongkos Perkara	-	-	-
Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	-	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah	-	-	-
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana	-	-	-
Jumlah	13.009.614,00	14.863.656,00	(12,47)

Beban Pegawai
Rp1.877.419.705

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.877.419.705 dan Rp2.091.541.538.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 10,24 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Penurunan Beban Pegawai dikarenakan adanya mutasi antar satker. Rincian Beban Pegawai Semester I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	919.468.680	913.713.200	0,63
Beban Pembulatan Gaji PNS	12.492	15.083	(17,18)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	54.879.420	60.275.984	(8,95)
Beban Tunj. Anak PNS	17.918.772	20.812.120	(13,90)
Beban Tunj. Struktural PNS	23.400.000	23.400.000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	621.280.000	807.620.000	(23,07)
Beban Tunj. PPh PNS	93.214.741	95.283.811	(2,17)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	1.877.419.705	2.091.541.538	(10,24)

*Beban Persediaan
Rp22.644.200*

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp22.644.200 dan Rp16.085.686

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 40,77 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Persediaan konsumsi	22.644.200	16.085.686	40,77
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	22.644.200,00	16.085.686	40,77

*Beban Barang dan Jasa
Rp280.187.166*

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp280.187.166 dan Rp313.403.683.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 10,60 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Beban barang dan jasa Tahun 2024 mengalami penurunan dikarenakan Belanja barang dan jasa tahun 2024 dilakukan secara bertahap sedangkan pada tahun 2023 belanja barang dan jasa banyak direalisasikan di semester I. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	221.774.200	252.547.106	(12,19)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.180.000	3.701.000	39,96
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	17.319.665	34.015.000	(49,08)
Beban Barang Operasional Lainnya	33.359.900	3.676.000	807,51
Beban Langganan Telepon	391.901	400.446	(2,13)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	8.820.000	(100,00)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	-	8.360.000	(100,00)
Beban Sewa	2.161.500	1.884.131	14,72
	-	-	-
Jumlah	280.187.166	313.403.683,00	(10,60)

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp369.522.379 dan Rp223.824.216.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 65,09 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan banyaknya pemeliharaan yang dilakukan terhadap gedung, bangunan maupun rumah dinas Pengadilan Negeri Curup untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	153.121.000	90.701.000	68,82
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	99.861.000	34.339.260	190,81
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	113.395.079	97.304.156	16,54
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3.145.300	1.479.800	112,55
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	369.522.379	223.824.216	65,09

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp44.654.395 dan Rp40.236.574

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 10,98 persen disebabkan oleh Kenaikan Beban Perjalanan Dinas disebabkan oleh peningkatan aktivitas untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	43.114.395	39.356.574	9,55
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.540.000	880.000	75,00
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	44.654.395,00	40.236.574	10,98

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2023	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp281.816.947 dan Rp331.255.044.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	88.175.039	143.280.412	(38,46)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	193.641.908	187.974.632	3,01
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumah Penyusutan	281.816.947	331.255.044	(14,92)
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	281.816.947	331.255.044	(14,92)

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyisihan Piutang PNBP	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penyelesaian
Kewajiban Jangka
Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya Rp0

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Pegawai tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Semester I 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Semester I 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :
0

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.10.395.736.656,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.10.395.736.656,00 dan Rp.11.062.295.488,00

Defisit LO
Rp.2.863.235.178,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.2.863.235.178,00 dan Rp.3.001.483.085,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-13.890.875 yaitu sebagai berikut.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp.0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2024

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-13.890.875. .

Koreksi ini

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 30 Juni 2024

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
	-
Jumlah	-

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2024

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
-	-
Jumlah	-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.2.407.474.483 dan Rp.2.594.980.332. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagikan ke Entitas Lain	2.418.608.896
Diterima dari Entitas Lain	(11.134.413)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	2.407.474.483

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DKEL sebesar Rp 2.418.608.896, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 11.134.413

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2024

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2024

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2024 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir
Rp9.939.975.961*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.9.939.975.961,00 dan Rp.10.641.901.860,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 REVISI DIPA

Satker Pengadilan Negeri Curup melakukan Revisi Halaman III DIPA Satker 400126 TA 2024 Berupa Rencana Penarikan Dana

**DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PENGADILAN NEGERI CURUP
PER 30 JUNI 2024**

NO	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IJIN	SALDO
1	Pengadilan Negeri Curup	005	01	Virtual	653254001261000	BPG 146 Pengadilan Negeri Curup 01	BRI Cabang Curup	S-2732/WPB.12/KP.06/2021	0
2	Pengadilan Negeri Curup	005	03	Virtual	654444001271000	BPG 146 PN Curup 03	BRI Cabang Curup	S-153/WPB.12/KP.06/2021	0



Curup, 1 Juli 2024

Sekretaris Pengadilan Negeri Curup,

Sri Siska Yanti, S.Sos, M.Si
NIP. 198407062009042007

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
PENGADILAN NEGERI CURUP (400126)
Rekening Induk : RKK BUA MA OPS (032901xxxxxx304)
Virtual Account : 653254001261000 | BPG 146 PENGADILAN NEGERI CURUP 01
Periode : 01-06-2024 s/d 30-06-2024

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-06-05	15:00:29	31547019	Penggantian Uang Persediaan RM Untuk Keperluan Belanja Barang 241461301003304000001	0,00	0,00	26.745.449,00	26.745.449,00	SPAN	
2024-06-06	08:48:32	31561309	Pembayaran Belanja Barang berupa Honor Pengelola Keuangan Bulan Mei 2024 untuk 7 Pegawai. sesuai SK 241461301003319000001	26.745.449,00	0,00	3.302.136,00	30.047.585,00	SPAN	
2024-06-06	14:53:58	31582134	pengadilan negeri curup	30.047.585,00	30.047.585,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2024-06-14	08:13:09	31767853	653254001261000	0,00	0,00	2.352.000,00	2.352.000,00	BRIVA	
2024-06-25	13:44:31	31983072	Penggantian Uang Persediaan RM Untuk Keperluan Belanja Barang 241461301003853000001	2.352.000,00	0,00	16.695.619,00	19.047.619,00	SPAN	
2024-06-26	15:15:47	32021090	PN CURUP	19.047.619,00	19.047.619,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		49.095.204,00	49.095.204,00			
			Saldo Akhir				0,00		

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
DITJEN BADAN PERADILAN UMUM (03)
PENGADILAN NEGERI CURUP (400127)
Rekening Induk : RKK DITJEN BADILUM O (023001xxxxxx304)
Virtual Account : 654444001271000 | BPG 146 PN CURUP 03
Periode : 01-06-2024 s/d 30-06-2024

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-06-12	14:37:46	31723965	Penggantian Uang Persediaan RM Untuk Keperluan Belanja Barang 241461301003625000001	0,00	0,00	3.998.500,00	3.998.500,00	SPAN	
2024-06-13	14:49:08	31756719	pengadilan negeri	3.998.500,00	3.998.500,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2024-06-26	10:47:29	32006995	Penggantian Uang Persediaan RM Untuk Keperluan Belanja Barang 241461301003893000001	0,00	0,00	2.687.000,00	2.687.000,00	SPAN	
2024-06-26	15:15:02	32021069	PN CURUP 03	2.687.000,00	2.687.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		6.685.500,00	6.685.500,00			
			Saldo Akhir				0,00		

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN PENGADILAN NEGERI CURUP
PERIODE 30 JUNI 2024

NO	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IJIN	SALDO REK. KORAN
NIHIL									



Curup, 1 Juli 2024

Sekretaris Pengadilan Negeri Curup,

Sri Siska Yanti, S.Sos, M.S
NIP. 198407062009042007

DAFTAR REKENING LAINNYA PENGADILAN NEGERI CURUP
PERIODE 30 JUNI 2024

NO	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IJIN	SALDO REKENING KORAN
1	Pengadilan Negeri Curup	005	03	Giro	285485625	RPL 146 PN CURUP UTK PDT BIAYA PERKARA	Menteri Keuangan Nomor : S-3807/MK.5/2015 Tanggal 11-05-2015	BNI Cabang Curup	11.066.850



Curup, 1 Juli 2024
 Sekretaris Pengadilan Negeri Curup,

Sri Siska Yanti, S.Sos, M.Si
 NIP. 198407062009042807



Account Information

ACCOUNT STATEMENT

PENGADILAN NEGERI CURUP
JL BASUKI RAHMAT NO 15 DWI
INDONESIA

Account No. : 285485625 / RPL 146 PN CURUP UTK PDT BIAYA PERKARA(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Jun-24 - 30-Jun-24
Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							9,170,350.00
03/06/2024 08.56.52	03/06/2024 08.56.52	BENGKULU	188611	SETOR TUNAI RPL 146 PN CURUP UTK PDT BIAYA BY PANJAR PMERIKSAAN AN BHRUL FUADY	1,010,000.00	K	10,180,350.00
03/06/2024 12.08.39	03/06/2024 12.08.39	INTERNAL	466211	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013011217120335 00091728 0000 9882854824060065 SUWARNO	145,000.00	K	10,325,350.00
04/06/2024 10.18.26	04/06/2024 10.18.26	BENGKULU	773551	SETOR TUNAI 9882854824060067 MUHAMAD IHSAN FEBRIANTO	145,000.00	K	10,470,350.00
04/06/2024 10.21.33	04/06/2024 10.21.33	BENGKULU	095092	SETOR TUNAI 9882854824060066 DINDA WAHYU GUSTIANTI	145,000.00	K	10,615,350.00
05/06/2024 07.39.37	05/06/2024 07.39.37	INTERNAL	685393	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842156087600 OM360002000088887332 9882854824060068 RAHAYU GUSTIANA	145,000.00	K	10,760,350.00
05/06/2024 14.05.21	05/06/2024 14.05.21	INTERNAL	663211	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 11082282029288 5028141102029288 82029288 1766 9882854824060069 AISYAH	145,000.00	K	10,905,350.00
05/06/2024 14.08.29	05/06/2024 14.08.29	INTERNAL	768520	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 11082282029288 5028141102029288 82029288 1766 9882854824060070 AISYAH	145,000.00	K	11,050,350.00
05/06/2024 14.10.22	05/06/2024 14.10.22	INTERNAL	046757	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 11082282029288 5028141102029288 82029288 1767 9882854824060071 MARSUDI WALUYO	145,000.00	K	11,195,350.00
07/06/2024 09.57.37	07/06/2024 09.57.37	BENGKULU	535830	SETOR TUNAI 9882854824060072 BROTO	145,000.00	K	11,340,350.00
07/06/2024 12.59.19	07/06/2024 12.59.19	INTERNAL	402466	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013014073998166	145,000.00	K	11,485,350.00



Account Information

ACCOUNT STATEMENT

PENGADILAN NEGERI CURUP
JL BASUKI RAHMAT NO 15 DWI
INDONESIA

Account No. : 285485625 / RPL 146 PN CURUP UTK PDT BIAYA PERKARA(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Jun-24 - 30-Jun-24
Page : 2

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
10/06/2024 09.57.04	10/06/2024 09.57.04	INTERNAL	354545	OM360002000088887546 9882854824060073 KALBER KIFLI PANJAITAN TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221842166930880 OM360002000088888056 9882854824060074 SULISTIAWATI TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1890602734 6019005049468577 S1ACMB9503	145,000.00	K	11,630,350.00
10/06/2024 14.47.03	10/06/2024 14.47.03	INTERNAL	425121	4719 9882854824060075 BERRY PASANDRA	145,000.00	K	11,775,350.00
10/06/2024 14.47.32	10/06/2024 14.47.32	INTERNAL	442991	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1890602734 6019005049468577 S1ACMB9503 4729 9882854824060076 BERRY PASANDRA	145,000.00	K	11,920,350.00
11/06/2024 10.06.54	11/06/2024 10.06.54	BENGKULU	243248	TARIK CHQ CW128971 RIA MARGARETA TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013014076021834	5,000,000.00	D	6,920,350.00
11/06/2024 13.56.56	11/06/2024 13.56.56	INTERNAL	083009	OM360002000088887487 9882854824060077 SUNANDAR	145,000.00	K	7,065,350.00
13/06/2024 11.28.59	13/06/2024 11.28.59	BENGKULU	448380	SETOR TUNAI 9882854824060078 AGNES PUTRI CHAIRUNNISA TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013014056128385 00080495	145,000.00	K	7,210,350.00
13/06/2024 15.07.06	13/06/2024 15.07.06	INTERNAL	408448	0000 9882854824060080 AGNES ARIYANI	145,000.00	K	7,355,350.00
13/06/2024 15.08.30	13/06/2024 15.08.30	INTERNAL	459053	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013014056128385 00080495 0000 9882854824060079 DEDI SUSANTO	145,000.00	K	7,500,350.00



Account Information

ACCOUNT STATEMENT

PENGADILAN NEGERI CURUP
JL BASUKI RAHMAT NO 15 DWI
INDONESIA

Account No. : 285485625 / RPL 146 PN CURUP UTK PDT BIAYA PERKARA(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Jun-24 - 30-Jun-24
Page : 3

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
19/06/2024 12.08.16	19/06/2024 12.08.16	BENGKULU	294682	SETOR TUNAI 9882854824060081 UMAR CHAN HS MARHAEN TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 5221840961461663	145,000.00	K	7,645,350.00
19/06/2024 16.39.55	19/06/2024 16.39.55	INTERNAL	750013	OM36000200008888608 9882854824060082 Dwipertiwi Jelintahati	145,000.00	K	7,790,350.00
21/06/2024 11.41.13	21/06/2024 11.41.13	BENGKULU	363515	SETOR TUNAI 9882854824060083 DIAN SAPUTRA	145,000.00	K	7,935,350.00
21/06/2024 11.43.35	21/06/2024 11.43.35	BENGKULU	425801	SETOR TUNAI 9882854824060084 RIAN HIDAYAT	145,000.00	K	8,080,350.00
24/06/2024 11.38.56	24/06/2024 11.38.56	BENGKULU	000847	SETOR TUNAI RPL 146 PN CURUP UTK PDT BIAYA	1,800,000.00	K	9,880,350.00
24/06/2024 14.42.43	24/06/2024 14.42.43	BENGKULU	236646	SETOR TUNAI 9882854824060085 WENDI SUSANTO	145,000.00	K	10,025,350.00
25/06/2024 10.17.38	25/06/2024 10.17.38	BENGKULU	662217	SETOR TUNAI 9882854824060086 WELLYANTO SOEKARNO. W	577,000.00	K	10,602,350.00
26/06/2024 11.36.58	26/06/2024 11.36.58	INTERNAL	268809	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013013048739051 OM360002000088889436 9882854824060087 JUNIARTI	145,000.00	K	10,747,350.00
26/06/2024 12.08.12	26/06/2024 12.08.12	INTERNAL	407674	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013012280226082 OM360002000088885831 9882854824060088 SINTIA TRI PIKA NETI	145,000.00	K	10,892,350.00
26/06/2024 12.14.09	26/06/2024 12.14.09	INTERNAL	582120	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013012280226082 OM360002000088880033 9882854824060089 AGUSTIAN RIADI	145,000.00	K	11,037,350.00
27/06/2024 13.19.31	27/06/2024 13.19.31	BENGKULU	156127	SETOR TUNAI 9882854824060090 MEDI SUHANDRA	29,500.00	K	

Ending Balance :

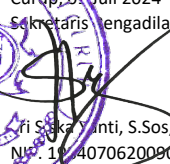
11,066,850.00

Total Debet : 1 5,000,000.00

Total Credit : 28 6,896,500.00

TELAAH KOREKSI LO TAHUN 2024

No	KDBAES1	KORWIL	KODE	SATKER	AKUN	URAIAN	AKRUAL PER TGL 31 DESEMBER 2023	JURNAL BALIK PER JANUARI 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	TGL SP2D	NO SP2D	SELISIH jurnal balik dan akrual	KET 1	SELISIH	KET 2
1	00501	2600	400126	PENGADILAN NEGERI CURUP	511129	Beban Uang Makan PNS	4.509.000	4.509.000	28.809.000	05/01/2024	241461301000009	-		-	
2	00502	2601	400126	PENGADILAN NEGERI CURUP	511129	Beban Uang Makan PNS	6.485.000	6.485.000	6.485.000	05/01/2024	241461305000005	-			
3	00503	2602	400126	PENGADILAN NEGERI CURUP	511129	Beban Uang Makan PNS	8.350.000	8.350.000	8.350.000	05/01/2024	241461305000004	-			
4	00504	2603	400126	PENGADILAN NEGERI CURUP	511129	Beban Uang Makan PNS	9.055.000	9.055.000	9.055.000	05/01/2024	241461301000010	-			
5	00505	2604	400126	PENGADILAN NEGERI CURUP	511129	Beban Uang Makan PNS	410.000	410.000	410.000	26/01/2024	241461301000218	-			
6	00501	2600	400126	PENGADILAN NEGERI CURUP	522112	Beban Langganan telepon	60.312	60.312	60.312	30/01/2023	241461301000034	-		-	
7	00501	2600	400126	PENGADILAN NEGERI CURUP	521111	Beban Keperluan Perkantoran	13.000.000	13.000.000	13.000.000	12/01/2024	241461302000008	-		-	

Curup, 01 Juli 2024
 Sekretaris Pengadilan Negeri Curup,

 Sri Siska Yanti, S.Sos, M.Si
 NIP. 19407062009042007

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : (005) Mahkamah Agung
Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (2600) Bengkulu
Satuan Kerja : (400126) Pengadilan Negeri Curup
No. Dokumen :
Tanggal : 30 Juni 2024
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Jurnal Koreksi

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☒ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Jurnal Koreksi

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	801.563	
	K	219211	Pendapatan Sewa Diterima Di Muka		801.563
JUMLAH					

Uraian :

Dibuat oleh :
Kasubag Keuangan dan Pelaporan

Yanik Nurul Fatimah, SH
Tanggal : 01 Juli 2024

Disetujui oleh :

KPA

Sri Niska Yanti, S.Sos.M.Si
Tanggal : 01 Juli 2024

Direkam oleh :
Operator SAIBA

Ovelia Soemantry, S.Ak
Tanggal : 01 Juli 2024

KARTU RINCIAN NILAI PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

PER 30 JUNI 2024

K/L : (005) Mahkamah Agung
 BAESI : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (2600) Bengkulu
 Satuan Kerja : (400126) Pengadilan Negeri Curup

No.	Uraian	Nilai SSBP	Jangka Waktu (Bulan)	TMT	Jatuh Tempo	Daluwarsa		Pendapatan Diterima di Muka
						Tahun Berjalan	s.d 30 Maret 2025	
1	Sewa Kantin	1.068.750	36 Bulan	30 Maret 2024	30 Maret 2025	267.187	801.563	1.068.750
Total					-			

PENGADILAN NEGERI CURUP
 Sekretaris Pengadilan Negeri Curup,

 Sri Siska Yanti, S.Sos, M.Si
 NIP. 198407062009042007

**LAPORAN PELAKSANAAN SEWA KANTIN
PADA PENGADILAN NEGERI CURUP
TAHUN 2024**



PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS I B

Jl. Basuki Rahmat No.15 Curup

Telp./Fax : (0732) 21481

Email : pn_curup@yahoo.co.id Website : www.pn-curup.go.id



PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS IB

Jl. Basuki Rahmat Nomor 15 Curup – 39112

Telp.(0732) 21209, 21481 Fax. (0732) – 21481

Website: www.pn-curup.go.id, email: pn_curup@yahoo.co.id

Curup, 28 Maret 2024

Nomor : 662/SEK W8.U2/KP.1.2 /3/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Laporan Pelaksanaan Sewa BMN
pada Pengadilan Negeri Curup Kelas IB

Yth.

Kepala Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

Jalan Museum No.02 Kel.Jembatan Kecil

Kota Bengkulu 38224

Melalui:

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
di Bengkulu

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu Nomor : S-9/MK.6/KNL.0501/2023 tanggal 08 Februari 2023 Perihal : Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Mahkamah agung C.Q Pengadilan Negeri Curup, bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan sewa BMN pada Pengadilan Negeri Curup Tahun 2024 (Dokumen Pelaksanaan Sewa terlampir.)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Sekretaris
Pengadilan Negeri Curup

Sri Siska Yanti, S.Sos., M.Si
NIP. 19840706 200904 2 007

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;
2. Arsip.

Curup, 18 Maret 2024

Kepada:
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Curup
di
tempat

saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syarifudin
Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Leban, 15 Mei 1975
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 15 Dwi Tunggal Curup

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan sewa kantin pada Pengadilan Negeri Curup Kelas IB yang akan berakhir pada tanggal 30 maret 2023. Perpanjangan sewa kantin ini saya ajukan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun berikutnya terhitung dari tanggal habis kontrak.

Demikian surat permohonan perpanjangan sewa kantin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,



Syarifudin



PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS IB

Jl. Basuki Rahmat Nomor 15 Curup – 39112

Telp.(0732) 21209, 21481 Fax. (0732) – 21481

Website: www.pn-curup.go.id, email: pn_curup@yahoo.co.id

SURAT PERJANJIAN PENGELOLAAN KANTIN

Nomor : 661 /WKPN.W8.U2/KS.00 /3/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-3-2024) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Sri Siska Yanti, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Curup
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 15 Curup

Yang selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**

2. Nama : **Syarifuddin**
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 15 Curup
Yang selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**

Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama disebut sebagai **“PARA PIHAK”** dan masing-masing disebut **“PIHAK”** mengadakan perjanjian pengelolaan kantin di lokasi Pengadilan Negeri Curup sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA berupa bangunan untuk kantin seluas 48 meter persegi untuk dikelola di lokasi Pengadilan Negeri Curup.

Pasal 2

1. Perjanjian sewa menyewa ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 28 Maret 2024. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati kemudian oleh kedua belah pihak;
2. PIHAK KEDUA dalam jangka waktu tiga bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian harus menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk memperpanjang perjanjian ini.

Pasal 3

1. Uang sewa kantin disepakati sebesar Rp.1.068.750,- (Satu juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) pertahun yang dibayar secara tunai paling lambat dua hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian sewa menyewa dengan Akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan;
2. Pembayaran uang sewa kantin dibuktikan dengan bukti setor pembayaran sewa ke rekening Kas Umum Negara.

Pasal 4

1. Pada saat berakhirnya perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus menyerahkan kembali kantin dalam keadaan kosong dan terpelihara kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA tidak berwajib untuk menyediakan sarana penampungan guna menampung keperluan dan barang-barang dari PIHAK KEDUA;
2. Apabila pada saat berakhirnya perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan PIHAK KEDUA tidak menyatakan kehendaknya untuk memperpanjang perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, maka untuk setiap keterlambatan PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu) perhari dan denda tersebut ditagih seketika dan sekaligus lunas;
3. Apabila keterlambatan tersebut berlangsung hingga 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengosongkan kantin dari semua penghuni dan barang-barang atas biaya PIHAK KEDUA dan bila mana perlu dengan bantuan pihak kepolisian setempat;

Pasal 5

1. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengubah fungsi serta peruntukan kantin tersebut;
2. PIHAK KEDUA atas tanggungan sendiri dapat melakukan perubahan pada kantin yang tidak mengubah konstruksi dan NJOP dan tambahan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi milik PIHAK PERTAMA;
3. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dengan izin dari PIHAK PERTAMA;

Pasal 6

1. PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa selama masa perjanjian berlaku, PIHAK KEDUA tidak akan mendapatkan tuntutan dan/gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas kantin tersebut;
2. Apabila terjadi perubahan kepemilikan terhadap kantin tersebut, PIHAK KEDUA tetap dapat menikmati hak sewa sampai berakhirnya perjanjian ini;
3. Selama perjanjian ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memindah hak sewanya sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;

Pasal 7

1. Pihak Kedua wajib menjaga kebersihan dan keamanan kantin;
2. Segala kerusakan kecil maupun besar dari kantin tersebut yang terjadi semata-mata karena kesalahan PIHAK KEDUA menjadi tanggungan sepenuhnya dari PIHAK KEDUA kecuali terhadap kerusakan yang ditimbulkan bukan oleh PIHAK KEDUA (*force majeure*) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menanggung kerugian masing-masing;

Pasal 8

Selama perjanjian ini berlangsung, PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajiban membayar tagihan listrik dan air;

Pasal 9

Pihak Kedua dilarang memberikan komentar atau informasi apapun yang berhubungan dengan perkara kepada siapapun;

Pasal 10

Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah;

Pasal 11

Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama oleh kedua pihak.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama



Sri Siska Yanti, S.Sos., M.Si

Pihak Kedua

Syarifuddin

Mengetahui,

Wakil Ketua

Pengadilan Negeri Curup



Ennierlia Arientowaty, S. H.

599949842

KANTOR POS INDONESIA (KANTOR)

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 27-03-2024 11:18:27

No.Resi : 39100-19/2024/806809 Petugas : 550000726

Tanggal Buku : 2024-27-03

Kode Cabang Pos : 000700

NTP : 916526111827

HTPN : 53AA4264MPFEI447

STAN : 916526

Tgl & Jam Bayar : 27-03-2024 11:18:27

Kode Billing : 820240327643271

Nama Wajib Bayar: Bendahara Penerimaan

K / - L : 005

Unit Eselon I : 01

Kode Satker : 400126

Jumlah Setoran : Rp. 1.068.750 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia
SIMARI PNBP

**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240327643271
Tanggal Billing	: 27-03-2024 10:31:42
Tanggal Kedaluwarsa	: 03-04-2024 23:59:00
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos/Fintech Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan
Kementerian/Lembaga	: MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	: Badan Urusan Administrasi
Satuan Kerja	: PENGADILAN NEGERI CURUP
Total Disetor	: 1.068.750 (IDR)
Terbilang	: Satu Juta Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh (IDR)
Status	: Belum Dibayar
NTB	: -
NTPN	: -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
Kode Akun	: 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
Jumlah Setoran	: 1.068.750 (IDR)
Keterangan	: Sewa Kantin PN Curup Tahun 2024

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, billing receipt ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses Simari PNBP untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam payment channel seperti Over The Counter bank/pos persepsi, ATM, Internet Banking, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompot Elektronik fintech.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (Billing Receipt) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau payment channel. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun Simari PNBP yang Anda miliki.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website [Simari PNBP](#).
9. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi Simari PNBP atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Biro Keuangan 3843348 Ext. 471, 756, 758 atau melalui email ke keuangan.pnbp@yahoo.co.id (Billing Simari PNBP).

--o0o--

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan Aplikasi Simari PNBP



1

Nomor : S-9/MK.6/KNL.0501/2023 8 Februari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Curup

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI
U.p.
Ketua Pengadilan Negeri Curup
Jl. Basuki Rahmat No. 15, Curup
Provinsi Bengkulu

Sehubungan dengan surat Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu nomor W8-U/2861/KU.00/11//2022 tanggal 14 November 2022 perihal Permohonan Sewa Kantin pada Pengadilan Negeri Curup, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan sewa terhadap Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Curup berupa sebagian tanah dan bangunan seluas 48 m², pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Curup dimaksud disewakan untuk jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun dengan pembayaran sewa per tahun ditetapkan dengan nilai sewa sebesar Rp1.068.750,00 (satu juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
2. Berdasarkan persetujuan ini, agar Pengadilan Negeri Curup dapat menetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang, yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, besaran tarif sewa dan jangka waktu sewa termasuk periodesitas sewa.
3. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut agar dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke rekening Kas Umum Negara dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa-menyewa.
4. Penyewa menyetorkan uang sewa sekaligus paling lambat sebelum perjanjian, dengan cara pembayaran secara tunai kepada pejabat pengurus BMN atau menyetorkannya ke rekening kas bendahara penerimaan di lingkungan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, setelah itu Pengadilan Negeri Mukomuko menyetorkan uang sewa tersebut ke kas Negara dengan Akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan.



5. Dalam hal penyewa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permohonan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
6. Laporan pelaksanaan sewa yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa-menyewa dan bukti setor pembayaran sewa ke rekening Kas Umum Negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu selaku Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara agar Pengadilan Negeri Curup melakukan penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan sewa Barang Milik Negara dimaksud.
8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang
Bengkulu



Teddy Suhartadi Permadi

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
3. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu
5. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
6. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu





Lampiran
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-9/MK.6/KNL.0501/2023
Tanggal : 08 Februari 2023

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC OF INDONESIA

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PADA PENGADILAN NEGERI CURUP
YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN KEPADA PIHAK KETIGA

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Lokasi	Luas yang Disewa (M ²)	Jangka Waktu	Periode	Nilai Sewa Per Tahun	Penyewa
1	2.01.01.04.001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Basuki Rahmat No. 15, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong	48 m ²	3 (tiga) tahun	2023 - 2026	Rp1.068.750,00,-	Perorangan
2	4.01.01.01.002	11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Basuki Rahmat No. 15, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong	48 m ²				
J U M L A H									Rp1.068.750,00,-

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Bengkulu



Teddy Suhartadi Permadi





SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 123/SEK/SK/III/2023

T E N T A N G

PENETAPAN PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA
BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PADA PENGADILAN NEGERI CURUP

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Negara yang akan disewakan, perlu diadakan penetapan pelaksanaan sewa terhadap Barang Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. tentang Penetapan Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Curup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/SEK/SK/5/2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Usulan Sewa Barang Milik Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Di Seluruh Indonesia;
6. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
- Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu Nomor S-9/MK.6/KNL.0501/2023 tanggal 8 Februari 2023 perihal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Curup.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA PENGADILAN NEGERI CURUP.

- KESATU : Menetapkan Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Curup untuk disewakan kepada Perorangan atas nama Syarifudin, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Penyewa menyetorkan seluruh uang sewa ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat 2 (dua) hari sebelum perjanjian sewa menyewa ditandatangani.
- KETIGA : Penyewaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan pihak Penyewa.
- KEEMPAT : Dalam hal Penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu sewa untuk periodesitas tahunan.
- KELIMA : Laporan pelaksanaan sewa agar disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Kepala Biro Perlengkapan dan Menteri Keuangan R.I., c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu dengan dilampiri Surat Keputusan Penetapan Harga Sewa, bukti setor dan perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Maret 2023

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



Prof. Dr. HASBI HASAN, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu;
7. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
8. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Ketua Pengadilan Negeri Curup;
10. Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu;
11. Sekretaris Pengadilan Negeri Curup untuk dilaksanakan/dilaporkan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 123/SEK/SK/III/2023
TANGGAL : 2 Maret 2023

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN
PADA PENGADILAN NEGERI CURUP

NO	KODE BARANG	NUP	JENIS BMN	LOKASI	LUAS YANG DISEWAKAN (M2)	JANGKA WAKTU	PERIODE	NILAI SEWA PER TAHUN (Rp)	PENYEWA
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	2010104001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Basuki Rahmat No.15 Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rajcng Lebong	48 M²	3 (Tiga) Tahun	2023-2026	Rp1.068.750,00	Perorangan atas nama Syarifudin
2	4010101002	11	Bangunan Gedung Kantor Permanen		48 M²				
JUMLAH								Rp1.068.750,00	

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



Prof. Dr. HASBI HASAN, S.H., M.H.



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code atau melalui aplikasi BeSign atau Panter (<https://bsre.bssn.go.id/repository>).



PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS IB

Jl. Basuki Rahmat Nomor 15 Curup – 39112

Telp.(0732) 21209, 21481 Fax. (0732) – 21481

Website: www.pn-curup.go.id, email: pn_curup@yahoo.co.id

SURAT PERJANJIAN PENGELOLAAN KANTIN

Nomor : 661 /WKPN.W8.U2/KS.00 /3/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-3-2024) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Sri Siska Yanti, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Curup
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 15 Curup

Yang selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**

2. Nama : **Syarifuddin**
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 15 Curup
Yang selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**

Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama disebut sebagai **“PARA PIHAK”** dan masing-masing disebut **“PIHAK”** mengadakan perjanjian pengelolaan kantin di lokasi Pengadilan Negeri Curup sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA berupa bangunan untuk kantin seluas 48 meter persegi untuk dikelola di lokasi Pengadilan Negeri Curup.

Pasal 2

1. Perjanjian sewa menyewa ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 28 Maret 2024. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati kemudian oleh kedua belah pihak;
2. PIHAK KEDUA dalam jangka waktu tiga bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian harus menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk memperpanjang perjanjian ini.

Pasal 3

1. Uang sewa kantin disepakati sebesar Rp.1.068.750,- (Satu juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) pertahun yang dibayar secara tunai paling lambat dua hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian sewa menyewa dengan Akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan;
2. Pembayaran uang sewa kantin dibuktikan dengan bukti setor pembayaran sewa ke rekening Kas Umum Negara.

Pasal 4

1. Pada saat berakhirnya perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus menyerahkan kembali kantin dalam keadaan kosong dan terpelihara kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA tidak berwajib untuk menyediakan sarana penampungan guna menampung keperluan dan barang-barang dari PIHAK KEDUA;
2. Apabila pada saat berakhirnya perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan PIHAK KEDUA tidak menyatakan kehendaknya untuk memperpanjang perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, maka untuk setiap keterlambatan PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu) perhari dan denda tersebut ditagih seketika dan sekaligus lunas;
3. Apabila keterlambatan tersebut berlangsung hingga 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengosongkan kantin dari semua penghuni dan barang-barang atas biaya PIHAK KEDUA dan bila mana perlu dengan bantuan pihak kepolisian setempat;

Pasal 5

1. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengubah fungsi serta peruntukan kantin tersebut;
2. PIHAK KEDUA atas tanggungan sendiri dapat melakukan perubahan pada kantin yang tidak mengubah konstruksi dan NJOP dan tambahan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi milik PIHAK PERTAMA;
3. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dengan izin dari PIHAK PERTAMA;

Pasal 6

1. PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa selama masa perjanjian berlaku, PIHAK KEDUA tidak akan mendapatkan tuntutan dan/gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas kantin tersebut;
2. Apabila terjadi perubahan kepemilikan terhadap kantin tersebut, PIHAK KEDUA tetap dapat menikmati hak sewa sampai berakhirnya perjanjian ini;
3. Selama perjanjian ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memindah hak sewanya sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;

Pasal 7

1. Pihak Kedua wajib menjaga kebersihan dan keamanan kantin;
2. Segala kerusakan kecil maupun besar dari kantin tersebut yang terjadi semata-mata karena kesalahan PIHAK KEDUA menjadi tanggungan sepenuhnya dari PIHAK KEDUA kecuali terhadap kerusakan yang ditimbulkan bukan oleh PIHAK KEDUA (*force majeure*) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menanggung kerugian masing-masing;

Pasal 8

Selama perjanjian ini berlangsung, PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajiban membayar tagihan listrik dan air;

Pasal 9

Pihak Kedua dilarang memberikan komentar atau informasi apapun yang berhubungan dengan perkara kepada siapapun;

Pasal 10

Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah;

Pasal 11

Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama oleh kedua pihak.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

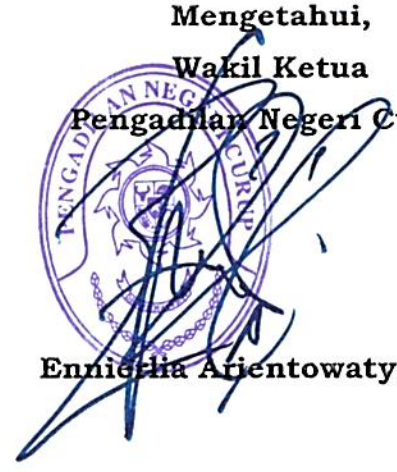

Sri Siska Yanti, S.Sos., M.Si

Pihak Kedua



Syarifuddin

**Mengetahui,
Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Curup**


Ennielha Arientowaty, S. H.